

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1. Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan

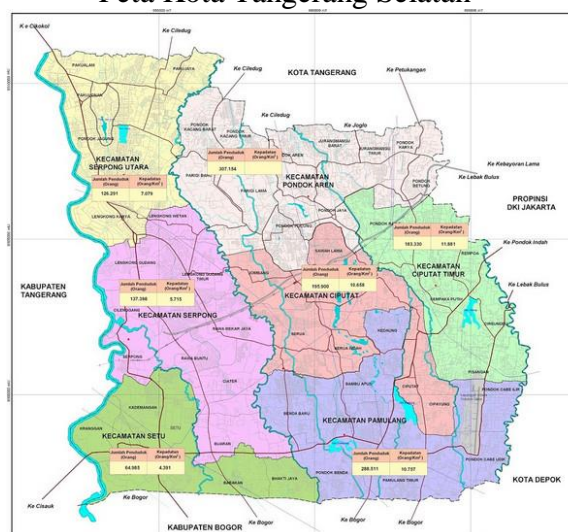
1.1.1. Kondisi Geografis

Kota Tangerang Selatan memiliki kondisi geografis yang berada pada koordinat 106°38'-106°47' Bujur Timur dan 06°13'30''- 06°22'30'' Lintang Selatan dengan luas daerah sebesar 147,19 km². Kota Tangerang Selatan berbatasan dengan beberapa wilayah lainnya dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sebelah Timur : Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok;
- c. Sebelah Selatan : Kota Depok dan Kabupaten Bogor;
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Tangerang;

Gambar 1.1

Peta Kota Tangerang Selatan



Sumber: www.tangselmedia.com

Kota Tangerang Selatan juga memiliki tujuh kecamatan dengan kecamatan paling luas adalah Pondok Aren, yang memiliki luas 29,88km² yang berarti terdiri dari 20,30% luas dari seluruh Kota Tangerang Selatan. Sedangkan, untuk kecamatan dengan luas paling kecil adalah kecamatan Setu yang memiliki besaran 14,80 Km² atau 10,06% dari total luas Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan. Berikut selengkapnya terkait luas wilayah dan dari masing-masing kecamatan di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap Luas Wilayah (%)
1	Serpong	24,04	16,33%
2	Serpong Utara	17,84	12,12%
3	Ciputat	18,38	12,49%
4	Ciputat Timur	15,43	10,48%
5	Pamulang	26,82	18,22%
6	Pondok Aren	29,88	20,30%
7	Setu	14,80	10,06%
Kota Tangerang Selatan		147,19	100

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021

1.1.2. Kondisi Demografis

Menurut data BPS Kota Tangerang Selatan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 berjumlah 1.747.906 jiwa. Kecamatan yang terbesar ialah

Kecamatan Pondok Aren dengan total penduduk pada tahun 2019 sebesar 418.420 jiwa, sementara kecamatan dengan penduduk terendah ialah Kecamatan Setu dengan jumlah penduduk sebesar 92.890 jiwa. Keterangan terkait jumlah penduduk menjadi penting dalam penelitian ini untuk melihat gambaran besar dari kondisi kependudukan di Kota Tangerang Selatan, yang nantinya akan dikaitkan juga dengan keaktifannya dalam menggunakan salah satu program pemerintah, yaitu Tangselpay.

Melihat kondisi demografis tidak dapat terlepas dari seberapa tinggi kualitas manusia pada suatu kota. Dalam melihat hal tersebut, peneliti akan menggunakan suatu indeks yang dapat menggambarkan secara umum terkait kualitas penduduk di suatu wilayah, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Kota Tangerang Selatan dalam tiga tahun terakhir (2018-2020) tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, cenderung fluktuatif. Namun bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Banten, IPM Kota Tangerang Selatan menjadi yang tertinggi dari seluruh daftar Kabupaten/Kota tersebut. Pada tahun 2018, skor IPM Kota Tangerang Selatan sebesar 81,17, jumlah tersebut meningkat menjadi 81,48 pada tahun 2019, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 81,36. Berikut gambaran kondisi IPM Kota Tangerang Selatan bila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dilihat dari skor IPM tersebut, dapat tergambarkan bahwa kualitas masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan lebih baik dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Banten.

1.1.3. Kondisi Perekonomian

Gambaran terkait kondisi perekonomian menjadi penting dalam penelitian ini untuk mengetahui secara umum sirkulasi perekonomian yang ada di Kota Tangerang Selatan. Pada bagian ini penulis akan menggunakan beberapa indikator perekonomian untuk menjelaskan kondisi perekonomian di Kota Tangerang Selatan.

a. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang dipakai guna mengetahui kondisi perekonomian sebuah wilayah pada periode tertentu. Dilihat dari periode penghitungan, PDRB dibagi dua, yakni PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Perbedaan diantara kedua jenis tersebut ialah PDRB ADHB digunakan untuk melihat nilai tambah produk dan layanan yang dinilai memakai harga ditahun tertentu, sedangkan PDRB ADHK dimanfaatkan guna melihat kekuatan sumber daya ekonomi, pergerakan serta susunan perekonomian sebuah wilayah.

Dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) nilai dari PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Tangerang Selatan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 nilai dari PDRB ADHB Kota Tangerang Selatan mencapai 82.840.308,25 juta rupiah., sedangkan PDRB ADHK Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 mencapai nilai 60.044.979,57 juta rupiah. Nilai tersebut tertinggi bila dibandingkan dengan indikator serupa dari Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu daerah yang

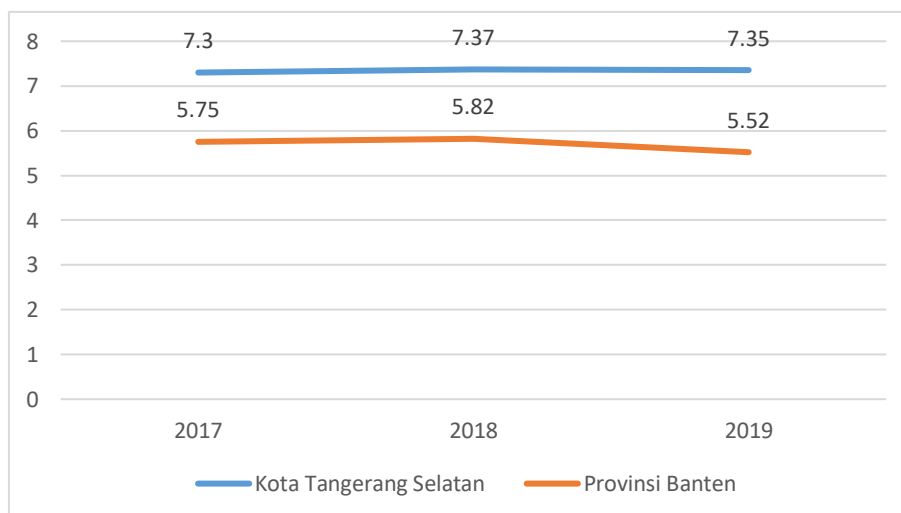
memiliki kondisi perekonomian terdepan di Provinsi Banten. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat melihat hal tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan dan memaksimalkan pendapat daerah yang guna meningkatkan pembangunan yang ada di Kota Tangerang Selatan.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Dalam menggambarkan kondisi perekonomian, penulis juga menggunakan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebagai salah satu instrumen untuk mendapatkan potret perekonomian di Kota Tangerang Selatan. Dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) mengalami peningkatan, meskipun belum signifikan. LPE Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 berada pada nilai 7,30%, sedangkan pada tahun 2019 jumlah tersebut menjadi 7,35%.

Gambar 1. 2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan



Sumber: Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Bidang Ekonomi Tahun 2020 Kota Tangerang Selatan

Dengan melihat perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan dengan Provinsi Banten, dapat dilihat bahwa LPE Kota Tangerang Selatan berada di atas Provinsi Bantendata diatas memperlihatkan bahwa aktivitas dan pembangunan ekonomi di Kota Tangerang Selatan secara rata-rata meningkat daripada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten lainnya.\

c. Inflasi

Indikator selanjutnya yang dapat digunakan untuk melihat gambaran umum dari perekonomian di suatu daerah adalah inflasi. Inflasi dapat menggambarkan keadaan terkait kecenderungan peningkatan harga secara signifikan (Dinar & Hasan, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS laju inflasi di Kota Tangerang Selatan dalam tiga tahun (2017-2019) terakhir mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2017 inflasi Kota Tangerang Selatan berada pada 3,69% jumlah tersebut menurun signifikan hingga tahun 2019 yang berada pada nilai 3,19%. Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa, kenaikan harga yang terjadi di Kota Tangerang Selatan dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) selalu mengalami penurunan. Hal ini menjadi suatu kesempatan bagi Pemerintah kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian maupun untuk menarik investor untuk berinvestasi di Kota Tangerang Selatan.

1.2. Gambaran Umum Tangselpay

Kota Tangerang Selatan telah ditunjuk oleh Kemenkominfo sebagai salah satu Kabupaten/Kota percontohan untuk mewujudkan 100 *Smart City* di Indonesia. Sebagai bentuk dari tindak lanjut perihal tersebut, pemerintah Kota Tangerang

Selatan mengeluarkan berbagai macam inovasi yang dapat mendorong terwujudnya *Smart City* di Kota Tangerang Selatan, salah satunya melalui aplikasi Tangselipay.

Tangselipay merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran terkait pemerintahan seperti pajak daerah, retribusi daerah, tagihan PDAM, hingga tagihan listrik. Keberadaan aplikasi Tangselipay telah dituangkan ke dalam suatu kebijakan daerah, yaitu Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tangselipay. Dengan ditetapkannya aplikasi tersebut kedalam suatu produk perundang-undangan, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan untuk mengembangkan aplikasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan No. 29 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa aplikasi Tangselipay ditujukan untuk tiga hal, yaitu:

1. Memudahkan masyarakat dalam Transaksi Layanan Keuangan Digital
2. Optimalisasi pendapatan asli Daerah
3. Mendukung gerakan nasional Transaksi non-tunai

Dengan amanat dari peraturan tersebut, sudah seharusnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melakukan pengembangan aplikasi Tangselipay ditujukan untuk ketiga hal tersebut.

Gambar 2.1
Aplikasi Tangselpay



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2.2
Fitur Aplikasi Tangselpay



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan informasi dari Google Play, aplikasi Tangselipay telah diluncurkan sejak 29 September 2019. Memasuki usianya yang ke-dua tahun, aplikasi Tangselipay telah mendapatkan pengembangan beberapa kali, dan pengembangan yang terbaru dilakukan pada 8 Juni 2021. Hal ini menunjukkan bahwa, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan, selaku pengembang aplikasi Tangselipay, berupaya untuk menjaga sustainability aplikasi Tangselipay agar berdasarkan dengan keperluan serta dan kenyamanan masyarakat, dan mengikuti perkembangan kondisi terkini.

Dalam tulisan ini, penulis akan meneliti implementasi dari program Tangselipay sebagai salah satu aplikasi pembayaran virtual yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan guna mencapai salah satu dari 100 kota percontohan bagi *Smart City* di Indonesia.